

RINGKASAN PENELITIAN

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010

**Gabriella Ara Adventana
Ch.Heni Kurniawan**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan Babarsari 43-44 Yogyakarta**

A. Abstrak

Pemerintah Provinsi DIY sampai tahun 2013 masih menggunakan basis *cash towar accrual* dalam pelaporan keuangannya, padahal ketentuan untuk menerapkan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010 yaitu pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual (SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi) dengan penerapan pada Pemerintah Provinsi DIY. Selain itu penelitian ini akan memperdalam hasil penelitian sebelumnya.

Jenis data adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner kepada 108 pegawai bagian keuangan atau bagian akuntansi seluruh dinas di Provinsi DIY dan wawancara kepada Kepala bagian akuntansi DPPKA Provinsi DIY. Pengolahan data menggunakan model penelitian analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM , komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel SDM dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan, tetapi teknologi informasi dan komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga mengemukakan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual hanya sebesar 23,20%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi,
Teknologi Informasi, Komunikasi , SAP berbasis akrual**

B. Latar Belakang Masalah

Reformasi pengelolaan keuangan negara terus diupayakan oleh pemerintah untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik di lingkup pemerintahan. Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP No.71 tahun 2010 untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi implementasi pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah akan menerapkan SAP berbasis akrual bagi Seluruh

pemerintahan baik pusat maupun daerah pada tahun 2015 (Tempo, 2010). Hal ini masih sulit diwujudkan karena masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Data yang diakses dari www.bpk.go.id menunjukkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat dua kabupaten yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Meskipun dalam hal ini pemerintah Provinsi DIY sendiri telah mampu menghasilkan LKPD dengan opini WTP untuk tahun anggaran 2012. Sistem akuntansi yang diterapkan pun masih menggunakan basis akuntansi *cash toward accrual* sampai tahun 2015 berdasarkan data yang diakses dari www.dppka.jogjaprov.go.id. Hal ini menunjukkan perlunya Pemerintah provinsi DIY mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual dengan serius agar kualitas laporan keuangan dapat terjaga dan mampu menularkan pada pemerintah kabupaten dan kota lainnya yang ada di DIY.

Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan, untuk mencapainya perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang menentukan tingkat pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini akan mengacu pada tiga penelitian terdahulu yaitu penelitian Aldiani (2009) yang meneliti pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, Ardiansyah (2012) yang meneliti pada KPPN Malang dan Indah (2008) melakukan penelitian pada pemerintah daerah kota Medan.

Hasil dari penelitian Aldiani (2009) dan Indah (2008) menunjukkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi informasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP basis akrual menurut Aldiani (2010). Sedangkan menurut Ardiansyah (2012) SDM dan komunikasi berpengaruh, tetapi komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan SAP. Karena terdapat perbedaan hasil dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat pentingnya penerapan SAP berbasis akrual di Provinsi Yogyakarta, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan penerapan SAP berbasis akrual di Provinsi DIY.

C. Perumusan Masalah

1. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?
2. Apakah komitmen organisasi yang ada di pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?
3. Apakah teknologi informasi yang diterapkan pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?

4. Apakah tata cara komunikasi yang dilakukan pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?
5. Apakah sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi pemerintah provinsi DIY berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual menurut PP No.71 Tahun 2010?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji kembali penelitian terdahulu variabel SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi dengan penerapan di Pemerintah Provinsi DIY.
2. Untuk memperdalam hasil penelitian dengan menambah deskriptif.

E. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Menurut Mahsun et al., (2013) standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2. Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari proses akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan , untuk digunakan oleh pihak – pihak eksternal yang berkepentingan. (Mahsun et al, 2011).

3. Basis akuntansi akrual

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dalam kerangka konseptual Paragraf 42 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Basis akrual digunakan untuk Laporan Operasional (LO) dan Neraca. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran disusun dan dilaksanakan berbasis kas. Bila anggaran disusun berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Perbedaan mendasar dari basis akrual dengan basis kas ialah terletak pada konsep pengakuan belanja dan pendapatan pada suatu periode. Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting*) digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (*earned*) dan biaya (*expense*) pada saat terjadi (*incurred*), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan.

4. Perbedaan PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini, sebenarnya sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Walaupun PP ini menginstruksikan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni, namun masih diperkenankan penerapan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2015. Perbedaan antara PP 71 dengan PP 24 tahun 2005, utamanya terkait dengan komponen laporan keuangan, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perbedaan Komponen Laporan Keuangan

PP No 24 Tahun 2005 (Basis Kas menuju Akrual)	PP No 71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
<ul style="list-style-type: none">• Laporan Realisasi Anggaran (LRA)• Neraca• Laporan Arus Kas• Catatan atas Laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Realisasi Anggaran(LRA)• Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih• Neraca• Laporan Arus kas• Laporan Operasional• Laporan Perubahan Ekuitas• Catatan Atas Laporan Keuangan

(Sumber : Hariyanto, 2012)

5. Implementasi SAP berbasis akrual

Perubahan dari *cash basis* menjadi *accrual basis* memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologis masyarakat negara tersebut (Yamamoto dalam Mardiasmo,2009). IFAC dalam Nazier (2009) menyatakan perubahan fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari *cash basis* menjadi *accrual basis* perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. IFAC mensyaratkan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandat dari peraturan perundang-undangan yang jelas, komitmen politik, komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, SDM yang memadai, kemampuan teknologi dan sistem informasi yang memadai , dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislatif

6. Kesiapan Pemda dalam Implementasi PP No.71 Tahun 2010

Armenakis et al. dalam Herlina (2013) mendefinisikan kesiapan (readiness) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holt et al. dalam Herlina (2013) adalah Sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh : apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara

kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo.

7. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri,2010). Menurut Tjiptoherijanto dalam Indriasari (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi , termasuk akuntansi , dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut.

8. Komitmen Organisasi

Luthans dalam Aldiani (2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Menurut Robbins (2006) komitmen organisasi adalah keadaan dimana pegawai mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu.

9. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto,2012). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*),*database*, jaringan (internet, intranet),*electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., dalam Indriasari,2008). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Menurut Aldiani (2010) perangkat pendukung yang memberikan sarana kepada penyusun laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

1. Perangkat keras

Perangkat keras (*hardware*) adalah perangkat yang berwujud fisik dan kasat mata.

2. Perangkat lunak

Perangkat lunak (*software*) meliputi perintah-perintah yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya (Mulyono dalam Aldiani, 2010)

10. Komunikasi

Flippo dalam Gibson (2000) membuat definisi komunikasi sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu idea dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Menurut Robbins (2006), komunikasi di dalam organisasi sering digambarkan sebagai

komunikasi formal. Menurut Edwar dalam Herlina (2013) ada beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

F. Hipotesis

1. Pengaruh antara sumber daya manusia dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (Insani dalam Kusuma, 2013). SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini didukung oleh Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca dalam Kusuma (2013) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan. Temuan ini didukung penelitian yang pernah dilakukan Indah (2008), Aldiani (2010), Ardiansyah (2012), Faradillah (2013), dan Herlina (2013). Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga bahwa :

H1 : Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

2. Pengaruh antara komitmen organisasi dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi (Aldiani, 2010). Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi organisasi akan tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja. Hal ini sesuai menurut penelitian Aldiani (2010) tetapi tidak menurut penelitian Ardiansyah (2012). Berdasarkan kedua penelitian yang tidak mempunyai hasil yang sama tersebut, maka penulis menduga hipotesa sbb:

H2 : Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

3. Pengaruh antara teknologi informasi dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2013), Aldiani (2010) dan Romilia (2011) yang memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas

teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut :

H3 : Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

4. Pengaruh antara komunikasi dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Menurut Edwar dalam Herlina (2013) komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardiansyah (2012) dan Romilia (2011) bahwa komunikasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah :

H4 : Komunikasi berpengaruh secara positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

5. Pengaruh antara sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

Sumber daya manusia yang ada akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya dengan adanya komitmen pemerintah dan penerapan peraturan ini tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa didukung oleh teknologi informasi yang layak dan memadai. Sumber daya manusia, komitmen, dan teknologi informasinya secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 tahun 2005 di Kabupaten Labuhan Batu menurut penelitian oleh Aldiani (2010).

Selain itu berdasarkan dugaan semua hipotesis secara parsial berpengaruh positif maka dapat dikatakan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang dihipotesakan sbb:

H5: Sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi , dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

G. Metode Penelitian

Jenis data adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner kepada 108 pegawai bagian keuangan atau bagian akuntansi seluruh dinas di Provinsi DIY dan wawancara kepada Kepala bagian akuntansi DPPKA Provinsi DIY. Pengolahan data menggunakan model penelitian analisis regresi linear berganda.

H. Hasil Penelitian

a. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas pada variabel Sumber Daya Manusia (SDM), item pertanyaan yang tidak valid adalah item pertanyaan nomor 3 dengan r hitung (0,067) < r tabel (0,159). Item pertanyaan nomor 3 harus dikeluarkan dari variabel SDM. Hasil pengujian setelah mengeluarkan item pertanyaan nomor 3

maka seluruh variabel r hitung $>$ r tabel lolos uji validitas. Terdapat dua pertanyaan pada variabel kesiapan penerapan SAP berupa pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan nomor 6 dan nomor 8. Ketika melakukan pengujian cara menskornya dilakukan terbalik.

Seluruh hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* $>$ syarat nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,7 (Ghozali, 2011). Variabel Sumber Daya Manusia memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,748, variabel komitmen organisasi 0,804, variabel teknologi informasi 0,772, variabel komunikasi 0,750 dan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual 0,708. Hal ini berarti seluruh variabel *reliable*.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

- Hasil uji normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan uji grafik dan uji statistik. Uji statistik dengan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai probabilitas Asymp (Sig.) 0,069 $>$ 0,05. Hal ini menandakan bahwa data terdistribusi secara normal.

- Hasil uji multikolinearitas

Seluruh variabel independen memiliki hasil perhitungan nilai tolerance $>$ 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) $<$ 10. Variabel SDM bernilai tolerance 0,476 dan nilai VIF 2,103. Variabel komitmen organisasi bernilai tolerance 0,655 dan nilai VIF 1,526. Variabel teknologi informasi bernilai tolerance 0,565 dan nilai VIF 1,770. Sedangkan variabel komunikasi bernilai tolerance 0,515 dan nilai VIF 1,941. Hal ini menandakan bahwa antar variabel independen dalam model regresi tidak terdapat multikolonieritas.

- Hasil uji heteroskedastisitas

Pengujian menggunakan metode *Spearman's Rho testing* dan *Glejser tes*. Uji Glesjer biasanya digunakan untuk sampel $>$ 100. Pengujian dengan metode uji glesjer menunjukkan bahwa SDM memiliki nilai sig. 0,021, komitmen organisasi sig. 0,006, teknologi informasi sig. 0,333 dan komunikasi sig. 0,086. Terdapat dua nilai probabilitas signifikansi variabel independen $<$ 0,05 yaitu Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi. SDM dan komitmen organisasi memiliki masalah heteroskedastisitas. Transformasi variabel akan dilakukan untuk mengobati adanya heteroskedastisitas dengan menggunakan transformasi dalam bentuk logaritma (\log_{10}). Hasil pengujian heteroskedastisitas setelah dilakukan transformasi data menunjukkan seluruh nilai probabilitas signifikan $>$ 0,05. Variabel SDM sig. 0,345, komitmen organisasi sig. 0,399, teknologi informasi sig. 0,792 dan komunikasi 0,114. Variabel independen lolos uji heterokedastisitas.

- Hasil uji autokorelasi

Nilai *durbin-watson* menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel (n) = 108 dan jumlah variabel independen (k) = 4 dalam model regresi ini menghasilkan nilai sebesar 1,769. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel sebesar $du = 1,7637$ dan $dl = 1,6104$. Nilai *durbin-watson* (DW) adalah $1,769 >$ (du) = $1,7637$ dan $<$ $4 - du = 2,2363$ membuat kesimpulan bahwa dalam model ini lolos uji autokorelasi.

c. Hasil Uji Hipotesis

Persamaan regresi berganda penelitian ini adalah:

$$Y = 13,589 + 0,123X_1 + 0,231X_2 + 0,034X_3 + 0,0097X_4 + e$$

Beberapa tahapan yang dilakukan untuk menguji hipotesis adalah :

- a. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F)
F tabel = 2,46 dengan menggunakan $\alpha = 0,1$, $df_1 = 4$, dan $df_2 = 103$. F hitung (9,068) > F tabel (2,46) maka H_a diterima. Artinya SDM, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi secara simultan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Provinsi DIY.
- b. Hasil Uji Signifikan Parsial (Pengujian Nilai-t)
Nilai t-tabel = 1,28982 dicari pada $\alpha = 0,1$, $df (n-k-1) = 103$ dengan pengujian satu sisi (one-tailed). Hanya SDM dengan nilai t-hitung (1,741) pada prob sign. (0,085) dan Komitmen Organisasi dengan nilai t-hitung (1,926) pada prob sig. (0,057) yang berpengaruh secara parsial terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual karena t-hitung > (1,289) dan prob sig. < (0,1). Sedangkan variabel Teknologi Informasi dengan t-tabel (0,455) pada prob sign. (0,650) dan Komunikasi yang bernilai t-tabel (1,271) pada prob sign. (0,206) tidak berpengaruh.
- c. Hasil Uji Koefisien Determinan (Adjusted R^2)
Nilai adjusted R^2 (adjusted R Square) sebesar 0,232. Hal ini berarti persentase sumbangan pengaruh variabel independen hanya mampu menjelaskan sebesar 23,20% terhadap variabel dependen kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemda Provinsi DIY. Sedangkan 76,8 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

I. Pembahasan

1) Pengaruh antara Sumber Daya Manusia dengan Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual

Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual. Menurut Bapak Wiyos Santoso, S.E, M.Acc, meskipun hingga saat ini pemerintah provinsi DIY masih menggunakan dukungan jasa konsultan bagi penyusunan laporan keuangan, tetapi dengan adanya Kebijakan Akuntansi yang akan diberikan kepada seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DIY diharapkan dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Disamping pemberian kebijakan akuntansi, pelatihan dan sosialisasi terus diberikan kepada penyusun laporan keuangan mengingat bahwa sebagian besar pegawai bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldiani (2010) dan Ardiansyah (2012), tetapi tidak sesuai penelitian Romilia (2011).

2) Pengaruh antara Komitmen Organisasi dengan Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual

Komitmen Organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini menandakan terdapat komitmen organisasi yang tinggi untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah provinsi DIY pada tahun 2015 mendatang. Responden juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Aldiani (2010) tetapi berbeda dengan penelitian Romilia (2011) dan Aldiani (2010), penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2012).

3) Pengaruh antara Teknologi Informasi dengan Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual

Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual. Bapak Wiyos Santoso, S.E , M.Acc mengatakan pemerintah Provinsi DIY hingga saat ini telah berupaya mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Namun tidak semua pegawai dapat mengakses penyusunan laporan keuangan, hanya kepala bagian yang menaungi bagian akuntansi dan keuangan dan pegawai yang bertanggung jawab dalam menyusun pembukuan akuntansi yang mendapat wewenang. Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh karena dalam hal ini sebagian besar responden adalah staf keuangan, hanya 7,41% responden yang merupakan kepala bagian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Kusuma (2013), tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Indah (2008) , Romilia (2011) dan Aldiani (2010).

4) Pengaruh antara Komunikasi dengan Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual

Komunikasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Komunikasi internal yang terjalin didalam institusi pemerintah provinsi DIY belum terlaksana secara baik. Hal ini dikarenakan pembebanan tanggung jawab penyusunan pembukuan hanya diserahkan oleh satu orang dari masing-masing dinas. Pihak eksternal memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi keuangan. Hanya pihak eksternal yang memiliki kepentingan tertentu yang dapat mengaksesnya. Hasil penelitian ini mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh Romilia (2011), tapi tidak mendukung penelitian Ardiansyah (2012).

5) Pengaruh antara Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kesiapan Penerapan SAP berbasis akrual

SDM, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan SAP berbasis akrual. Penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi DIY sampai tahun 2013 masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual, kemudian tahun 2014 dilakukan uji coba menggunakan basis akuntansi akrual , setelah itu penerapan di seluruh SKPD (termasuk dinas) dilaksanakan pada tahun 2015. Pelaksanaan uji coba hanya pada tiga SKPD yaitu Biro Perekonomian, Dinas Pengelolaan Keuangan, Kas dan Aset daerah (DPKKA) dan Inspektorat Provinsi DIY. Hal ini serupa dan mendukung penelitian Aldiani (2010).

J. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian berhasil membuktikan bahwa SDM berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

2. Penelitian ini berhasil memberikan bukti bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual di Pemda Provinsi DIY.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pemda Provinsi DIY.
4. Penelitian ini tidak dapat menemukan adanya pengaruh komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pemda Provinsi DIY.
5. SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pemda Provinsi DIY.

Berdasarkan hasil yang didapat, maka penelitian ini dapat menjawab tujuan penelitian. Setelah menguji kembali variabel penelitian terdahulu dengan objek di Provinsi DIY, hanya variabel SDM dan komitmen organisasi yang berpengaruh positif signifikan sedangkan teknologi dan informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian ini juga memperkaya deskriptif dengan wawancara kepada Kepala Bagian Akuntansi DPPKA Provinsi DIY dan diskusi dengan beberapa responden.

K. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini adalah :

1. Sumbangan pengaruh variabel independen (Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi) hanya mampu menjelaskan sebesar 23,20% terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dapat dimasukkan dalam penelitian sejenis.
2. Ada item pertanyaan dalam variabel SDM yang tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari penelitian yaitu berupa kesiapan responden tentang perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan sesuai SAP basis akrual.
3. Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2014 masih menerapkan uji coba hanya pada tiga SKPD. Selain itu dukungan jasa konsultan masih terus digunakan untuk membantu pegawai pengelola keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan bukan akuntansi. Berdasarkan hasil diskusi dari beberapa responden, mereka mengetahui SAP berbasis akrual dari peneliti. Responden juga menyatakan bahwa pada akhirnya hasil akhir (laporan konsolidasi) juga akan diperiksa kembali oleh bagian DPPKA, maka mereka merasa tidak harus membuat laporan keuangan semaksimal mungkin. Contoh dalam kasus ini, responden kesulitan dalam klasifikasi biaya dan beban karena menurut mereka apapun klasifikasinya akan menghasilkan selisih hasil yang sama.

L. Saran

1. Jika ingin melakukan penelitian tentang kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dapat menambahkan variabel lain seperti ukuran satuan kerja (Kusuma, 2013), Budaya Organisasi (Faradillah, 2013), aturan hukum (Ardiansyah, 2012), dsb. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan item pertanyaan pada kuesioner yang akan disebar.

2. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas (pemerintah pusat) atau lingkup di daerah lain yang berbeda karakteristiknya.
3. Bagi Pemerintah provinsi DIY dapat melakukan *recruitment* karyawan dan menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahliannya dan latar belakang pendidikannya agar penggunaan jasa konsultan dapat dikurangi atau digunakan seminimal mungkin. Selain untuk menghemat pengeluaran pemerintah, hal ini berguna agar kemandirian dan kesadaran untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas semakin ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy. (2009). *Kendala Penerapan SAP oleh Pemerintah Daerah*. www.syukriy.wordpress.com
- Aldiani, Sulani. (2009). Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 pada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Simposium Nasional XII*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Ardiansyah (2012) . *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (studi pada unit kerja KPPN Malang)* . Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Boedijoewono, Noegroho. (2007). *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis Jilid 1*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Damayanti, Etrin. (2012). *Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007 – 2009*. Skripsi, Universitas Indonesia , Jakarta.
- Faradillah, Andi (2013). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*. BP Undip, Semarang.
- Gibson et al., (2000). *ORGANIZATION :Behavior, Structure, Processes, 10th edition*. McGraw-Hill Companies, Inc, New York.
- Halim, Abdul. (2004). *Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah : Dua Pilar utama Manajemen Keuangan Daerah*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan.

- Hariyanto, Agus. (2012). *Penggunaan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. STIE Dharma Putra , Semarang.
- Indah. (2008). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi informasinya terhadap Keberhasilan Penerapan PP No.24 tahun 2005*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Indriasari, Desi (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.
- Ichsan, Muhammad. (2010). *Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan : Pondasi bagi Penerapan Akuntansi Biaya*.
<http://www.scoresociety.com/component/content/article/36-tulisan/66-basis-akrual-akuntansi-pemerintahan>
- Jogiyanto. (2010) . *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman*. BPFU UGM, Yogyakarta.
- Junaidi. (Mei 2010) . *Statistik* . <http://junaidichaniago.wordpress.com/tag/statistik/>
- Mahsun et al. (2012) .*Akuntansi Sektor Publik, Edisi ketiga*. BPFU UGM , Yogyakarta.
- Nazier, Daeng. (22 Juli 2009). *Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan*. Seminar Nasional. www.bpk.go.id
- Mardiasmo.(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martiningsih.(2008). *Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah*. Skripsi. Universitas Mataram, Mataram.
- Novalina, Eka. (2011). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sampang)*. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Nugraha. (2013). *Persepsi Akuntan Perusaahn perhotelan terhadap kepatuhan akuntan public atas kode etik di provinsi Bali*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Priyatno, Duwi. (2013) *Mandiri Belajar Analisis Data degan SPSS*. Penerbit Mediakom, Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang – Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2012). *Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.

Putri. (2012). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Peemda Kab. Bengkalis*. Skripsi. Univeristas Sriwijaya, Bengkalis.

Rahayu, Siti. (2009). *Penggunaan Metode Durbin Watson dalam Menyelesaikan Model Regresi yang Mengandung Autokorelasi*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Robbins, Stephen P. (2006) . *Perilaku Organisasi, Edisi ke-10*. PT. Indeks, Jakarta.

Romilia, Riana. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Kabupaten Bangkalan*. Skripsi. STIE Perbanas, Surabaya.

Sari. (2011) . *Pengaruh pengendalian Internal terhadap transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung.

Sekaran, Uma. (2009). *Research Methods for Business : A Skill – Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York.

Seminar Nasional. (19 Maret 2011) . *Audit Sektor Publik : “Peran SDM Aparatur Pemerintah Daerah dan Auditor Eksternal dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Audit Keuangan Daerah”*. www.umy.ac.id

Suhardjanto dan Yulianingtyas. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sukmaningrum.(2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Hidayat, Anwar. (2013). *Rumus Kolmogorov – Smirnov*.
<http://statistikian.blogspot.com/2013/01/rumus-kolmogorov-smirnov.html>
- Priyatno, D. (November 2011). *Uji Heteroskedastisitas*.<http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/uji-heteroskedastisitas.html>
- Safar, Gempur. (21 April 2010). *Statistics of your live*.
<http://exponensial.wordpress.com/tag/kolmogorov-smirnov/>
- Sulaiman , Wahid. (2004). *Analisis Regresi menggunakan SPSS*.
Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Suparyanto.(22 Juli 2011). *Uji validitas kuesioner*.
<http://www.carantrik.com/2011/07/uji-validitas-kuesioner.html>
- Media Indonesia .(9 Desember 2006). Sistem Akuntansi Pemerintah lemah.
- Indosiar.2007. Temuan BPK: Laporan Keuangan Pemda Tidak Layak.www.indosiar.com
- Tempo Interaktif.(14 Desember 2010).Pemerintah terapkan standar akuntansi baru. www.tempo.com
- Tempo Interaktif. (5 April 2011) .Akuntan tak harus berpendidikan akuntansi.www.tempo.com
-
- . (18 September 2012). *SAP Akrual Mulai 2015*.
<http://www.dppka.jogjaprov.go.id/cmsakuntansi/>